BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah unit produksi yang mempunyai peranan sangat penting sebagai penyangga daerah perkotaan (komoditas utamanya ialah sektor pertanian). Pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Usaha meningkatkan sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat umum secara berkelanjutan, berlandaskan pada potensi atau kemampuan pedesaan. Tujuan pencapaian pembangunan desa, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera maupun berkeadilan.

Persoalan yang selalu dihadapi dari masa ke masa dan selalu menjadi perhatian Pemerintah adalah persoalan kemiskinan, dimana jika berbicara tentang suatu negara sampai pelosok desa sekalipun kemiskinan menjadi persoalan yang sampai saat ini masih belum menuai solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi faktor penghambat pembangunan suatu daerah karena kemiskinan merupakan penyakit sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan berbasis pedesaan memiliki peranan penting untuk memperkuat fondasi perekonomian suatu negara dan pembangunan desa juga akan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi yang strategis sebagai basis pembangunan (Arfiansyah, 2020).

Diketahui bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dahulu hingga sekarang akan tetapi masih belum mampu dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga pentingnya pembangunan pedesaan perlu dilakukan perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi agar kesempatan bagi desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat kedudukan desa menjadi lebih kuat dan memberikan peluang besar bagi desa dalam kewenangan mengelolah keuangannya sendiri serta membelanjakan anggaran yang akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan (Saputra, 2016).

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan urusan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada prinsipnya tujuan pemerintah memberikan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan pedesaan melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Milikiachristi, 2021).

Dana desa dikelola secara tertib sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten atau Kota diatur dalam Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, bahwa dana desa setiap Kabupaten atau Kota dihitung berdasarkan jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten atau Kota. Hasil perhitungan Pemerintah, dimana Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari 12 desa

dan realisasi dana desa yang telah diterima dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Total Penerimaan Dana Desa di Kecamatan Oba Tahun 2018-2020

Tahun	Total Penerimaan Dana Desa Kecamatan Oba
2018	Rp. 9.873.255.000
2019	Rp. 11.807.858.000
2020	Rp. 12.579.629.000

Sumber: Dinas BPMD Kota Tidore Kepulauan

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi dana desa di Kecamatan Oba mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan infrastruktur pedesaan serta dapat untuk meminimalisir jumlah kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan potensi lain yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Dengan anggaran dana desa, desa memiliki kesempatan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran hasil

produksi, pengembangan usaha peternakan, pertanian maupun perkebunan masyarakat, pengembangan kawasan wisata, dan pembentukan BUMDes. Penggunaan anggaran tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta meminimalisir jumlah kemiskinan (Arfiansyah, 2020).

Dengan melihat semua aspek permasalahan kemiskinan di daerah pedesaan, maka program dana desa merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan baik dari segi pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap desa khususnya di Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan (Lalira Dianti, 2018).

Penganggaran dana desa terbagi dalam beberapa bidang yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa (X_1), belanja bidang pembinaan kemasyarakatan (X_2), dan belanja bidang pemberdayaan masyarakat (X_3) terhadap kemiskinan (Y).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa terhadap jumlah kemiskinan di Kecamatan Oba?
2. Apakah efektivitas dana desa bidang pembinaan kemasyarakatan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan di Kecamatan Oba?
3. Bagaimana efektivitas dana desa bidang pemberdayaan masyarakat terhadap jumlah kemiskinan di Kecamatan Oba?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas dana desa bidang pelaksanaan pembangunan desa terhadap jumlah kemiskinan di Kecamatan Oba.
2. Untuk mengukur efektivitas dana desa bidang pembinaan kemasyarakatan terhadap jumlah kemiskinan di Kecamatan Oba.
3. Untuk menganalisis efektivitas dana desa bidang pemberdayaan masyarakat terhadap jumlah kemiskinan di Kecamatan Oba.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam perluasan penelitian yang sejenis dan memberikan kontribusi literatur sebagai bentuk empiris di bidang perencanaan pembangunan.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan dalam pengambilan kebijakan atau memutuskan suatu kebijakan mengenai pembangunan ekonomi serta infrastruktur pedesaan yang akan berdampak pada penanggulangan kemiskinan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan referensi dan tambahan wawasan bagi peneliti selanjutnya.